

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI TURUT TERGUGAT DALAM SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Alya Puteri Shofiyana
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing :

1. Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.
2. Edy Hendrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai turut tergugat dalam sengketa perbuatan melawan hukum di sektor jasa keuangan, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah doktrin hukum, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK, sebagai lembaga negara independen yang berfungsi mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, seringkali diikutsertakan sebagai turut tergugat dalam gugatan perdata demi memenuhi asas kelengkapan pihak (*plurium litis consortium*). Namun, secara substantif, OJK tidak memiliki hubungan hukum langsung dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dan lembaga pembiayaan, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata kecuali terdapat bukti nyata kelalaian pengawasan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam kasus yang dikaji, OJK hanya diminta tunduk pada putusan hakim tanpa dimintai ganti rugi, karena tidak terbukti adanya hubungan kausal antara tindakan atau kelalaian OJK dan kerugian yang dialami penggugat. Penelitian ini menegaskan bahwa pengikutsertaan OJK sebagai turut tergugat lebih bersifat formil daripada substantif, dan pengadilan cenderung menolak gugatan terhadap OJK jika tidak ditemukan bukti konkret kelalaian pengawasan. Dengan demikian, kedudukan OJK sebagai turut tergugat dalam sengketa perbuatan melawan hukum lebih sebagai pelengkap formalitas gugatan, bukan subjek hukum utama yang bertanggung jawab atas kerugian. Penelitian ini merekomendasikan agar penggugat hanya mengikutsertakan OJK jika terdapat bukti kuat kelalaian pengawasan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, guna menghindari gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau salah alamat (*error in persona*).

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Turut Tergugat, Sengketa Perdata

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE POSISTION OF THE FINANCIAL
SERVICES AUTHORITY (OJK) AS A CO-DEFENDANT IN UNLAWFUL
ACT DISPUTES**

*Name : Alya Puteri Shofiyana
Faculty of Law University of Surabaya*

Contributor :

- 1. Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.*
- 2. Edy Hendrawan, S.H., M.H.*

ABSTRACT

This research aims to provide a juridical analysis of the position of the Financial Services Authority (OJK) as a co-defendant in unlawful act disputes within the financial services sector, using the South Jakarta District Court Decision No. 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel as a case study. The study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, examining legal doctrines, jurisprudence, and relevant regulations. The findings indicate that OJK, as an independent state institution responsible for regulating and supervising the financial services sector, is often included as a co-defendant in civil lawsuits to fulfill the principle of party completeness (plurium litis consortium). However, substantively, OJK does not have a direct legal relationship in financing agreements between consumers and financial institutions, and thus cannot be held civilly liable unless there is concrete evidence of supervisory negligence that fulfills the elements of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. In the analyzed case, OJK was only required to comply with the court's decision without being ordered to pay damages, as there was no proven causal link between OJK's actions or omissions and the plaintiff's loss. The research emphasizes that the inclusion of OJK as a co-defendant is more formal than substantive, and courts tend to reject claims against OJK in the absence of concrete evidence of supervisory negligence. Therefore, OJK's position as a co-defendant in unlawful act disputes serves primarily as a formal complement to the lawsuit, not as the main legal subject responsible for damages. The study recommends that plaintiffs only include OJK when there is strong evidence of supervisory negligence meeting the elements of an unlawful act, to avoid the lawsuit being declared inadmissible or misdirected (error in persona).

Keywords: *Financial Services Authority (OJK), Third-Party Defendant, Civil Litigation*